

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Nelayan dan kehidupannya dalam sorotan berbagai media di gambarkan hidup di bawah garis kemiskinan. Taraf hidup di bawah garis kemiskinan sebagai masalah nasional, telah diupayakan usaha-usaha penanggulangannya secara bertahap dan berkesinambungan. Pemerintah telah menyalurkan berbagai jenis bantuan, khususnya bantuan berupa dana usaha dan pemberian kapal dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup nelayan kearah yang lebih baik.

Di satu sisi diharapkan pada sumber daya perikanan dan kelautan yang luas dan kaya serta mampu menghasilkan potensi ekonomi yang besar. Tetapi di sisi lain potensi ekonomi sumber kelautan belum juga dapat meningkatkan ekonomi para pelakunya.

Dalam pengamatan yang ada bahwa masyarakat nelayan dirasa sangat lamban mengalami pergeseran pola hidup, karena kebanyakan dari mereka melakukan usaha menghidupi keluarganya dengan berkerja sebagai buruh perkerja pada pengusaha kapal ikan yang dikelola oleh kalangan etnis cina yang biasa dipanggil oleh para nelayan dengan sebutan tauke. Nelayan buruh yang dimaksud, adalah nelayan yang menjadi tenaga pekerja pada perusahaan disektor penangkapan ikan dengan bermodalkan tenaga (jasa). Khususnya para nelayan pekerja/buruh pada usaha disektor perikanan ini, terdiri dari berbagai kalangan etnis seperti : Batak, Aceh, dan Melayu sebagai mayoritas.

Nelayan buruh dikawasan pergudangan Gabion Belawan sampai sat ini masih tetap menekuni bidang pekerjaan ini dengan hanya bermodalkan keahlian dan keterampilan hingga ada keluarga yang berprofesi turun menurun .

Tampaknya sulit bagi nelayan pekerja/buruh untuk berpaling dari pola kerja yang telah digeluti selama ini, walaupun mereka sungguh merasakan dan mengalami berbagai macam intervensi dan ketidakadilan dari perlakuan para pengusaha (tauke).

Praktek dari perlakuan yang dirasakan tidak mencerminkan hubungan timbal balik (kepedulian) yang baik dalam bentuk hubungan sosial kerja maupun hubungan sosial ekonomi sudah lama mereka alami. Bagaimana hubungan kerja yang terjalin dalam usaha ini, tampaknya kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak yang berkompeten dan terus berjalan tanpa ada gejolak Hubungan kerja yang terus berlangsung seperti saat ini, sangat tidak memungkinkan bagi nelayan pekerja untuk mengalami perubahan nasib mereka

Tauke sebagai pemilik modal, kapal dan teknologi serta nelayan sebagai buruh yang memiliki tenaga/keahlian pada dasarnya adalah merupakan satu komponen kesatuan yang utuh dalam membangun kerjasama di sektor industri perikanan. Operasional produksi perikanan laut sepenuhnya dijalankan oleh nelayan sebagai buruh/pekerja. Oleh karena itu ketergantungan tauke terhadap nelayan sangat kuat dimana hasil usaha sangat ditentukan produktifitas pekerja. Saling ketergantungan atas dasar beda kepentingan dalam menjalankan usaha disektor produksi perikanan perlu mendapat perhatian dari pihak yang terkait ,agar hubungan yang dibina dapat dipertahankan secara berimbang. Dalam

hubungan sosial kerja, para nelayan tampaknya menerima peraturan-peraturan yang mutlak ditentukan dan diberlakukan oleh tauke walaupun sifatnya menekan (sepihak). Pemberlakuan aturan dilakukan tanpa adanya bukti persetujuan dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) secara tertulis antara pihak yang terlibat. Hasil survey awal memberikan gambaran bahwa dalam hubungan sosial ekonomi, tauke memberlakukan pengupahan dengan sistem bagi hasil yang dianggap kurang sesuai dan jauh lebih menguntungkan pihak tauke. Besarnya pembagian dalam sistem bagi hasil, jenis ikan dan harga jual (lelang) mutlak ditentukan oleh tauke. Para nelayan tidak diperkenankan menjual hasil (bagiannya) kepada orang lain (luar), tetapi harus kepada tauke. Aktivitas bongkar muat kapal serta transaksi jual beli juga dilakukan di gudang dan berlangsung dibawah pengawasan pihak tauke/pengurus gudang.

Bentuk hubungan kerja sama yang ditetapkan atas dasar kesepakatan dan saling percaya membuka peluang adanya ketimpangan dalam hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak (tauke dan nelayan). Para nelayan merasakan adanya penekanan dari pemberlakuan aturan-aturan yang sifatnya sepihak, sementara mereka adalah pelaku utama disektor penangkapan ikan.

Sebagai pelaku utama disektor penangkapan ikan tentunya perlu menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha. Perlakuan sepihak yang dianggap memberatkan dan mengurangi gairah/produktivitas kerja berdampak langsung terhadap hasil usaha yang akhirnya akan menimbulkan kerugian. Pemberian dana awal operasional kapal selama melaut yang besarnya sangat tidak mencukupi kebutuhan nelayan serta pendapatan berdasarkan sistem bagi hasil dengan

jumlah perbandingan yang tidak seimbang, terpaksa diterima demi kelangsungan pekerjaan mereka.

Peranan mutlak tauke dalam hubungan kerja sama dengan nelayan merupakan akibat dari kuatnya sikap ketergantungan nelayan yang mengandalkan tauke sebagai jalan keluar ketika menghadapi masalah-masalah sulit. Kesulitan dalam ekonomi rumah tangga dapat diatasi untuk sementara waktu dengan cara pinjaman yang diterima dari tempat kerja. Pinjaman sebagai upaya menanggulangi kesulitan ekonomi rumah tangga adalah jalan pintas yang acap kali dilakukan karena proses penerimaan uang yang begitu cepat tanpa bunga dan hanya dengan jaminan potong upah.

Dalam kondisi yang demikian, sebenarnya nelayan sudah terjebak pada jalan untuk melanggengkan dominasi tauke. Semakin kuat ketergantungan, maka semakin melemahkan posisi nelayan. Situasi yang demikian memungkinkan dominasi tauke sebagai pemodal/pemilik usaha dapat terus bertahan bahkan semakin berpeluang untuk menciptakan sikap ketergantungan hidup yang tinggi bagi nelayan terhadap tauke. Mengingat sampai saat ini hubungan kerja sama kedua belah pihak tetap berjalan maka, nelayan dihadapkan pada kondisi yang dilematis. Disatu sisi adanya keinginan untuk melakukan upaya perubahan nasib, namun disisi lain merasa sulit menghindari sikap ketergantungan serta sulitnya mendapat pekerjaan lain

Pengusaha selalu memanfaatkan situasi yang berorientasi pada akumulasi keuntungan. Menjalankan fungsi, peran serta kepentingan berbeda dalam hubungan kerja berpotensi menimbulkan ketimpangan. Namun akibat hubungan

kerja sama yang tidak seimbang, dapat menimbulkan kelicikan-kelicikan sebagai bentuk perlawanan. Bagaimana bentuk perlawanan yang diupayakan serta rencana apa yang akan diperjuangkan, inilah yang akan ditelusuri untuk mendapatkan jawaban dibalik sikap pasrah nelayan buruh menghadapi dominasi pihak tauke

1.2. Rumusan Masalah

Kesepakatan kerja bersama antara tauke dan nelayan dengan kekuasaan yang tidak seimbang menempatkan tauke dalam posisi dominan. Tauke sebagai pemodal sekaligus pemilik usaha sangat menentukan dalam hubungan sosial kerja dan hubungan sosial ekonomi. Kesepakatan kerja bersama yang dianggap kurang sesuai dan sifatnya sepihak merupakan suatu masalah yang perlu segera mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Nelayan sebagai pekerja menyadari akan adanya berbagai tekanan dalam hubungan tersebut, namun tidak dapat berbuat dan tetap menggeluti pekerjaannya walaupun dengan upah yang tidak mencukupi (kecil). Sikap enggan para nelayan untuk berpaling dari pekerjaannya sebagai buruh dan bertahan dalam kondisi yang ada atau ketidaksiapan beralih profesi di bidang pekerjaan lain menimbulkan berbagai macam penafsiran.

Berdasarkan kondisi pekerjaan sebagai buruh kapal pada usaha produksi perikanan laut, maka masalah yang akan ditindaklanjuti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tauke mendominasi nelayan dalam hubungan kerja sama (hubungan sosial kerja dan ekonomi)
2. Bagaimana upaya dan rencana nelayan dalam memperjuangkan hidupnya di atas tekanan (dominasi), tauke dalam pekerjaannya.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini maka tujuan yang akan diharapkan adalah :

1. Mendeskripsikan dominasi tauke dalam relasi sosial dengan nelayan dalam membangun kesepakatan hubungan kerja dan ekonomi .
2. Mendeskripsikan gambaran upaya-upayadan rencana yang dilakukan nelayan untuk memperjuangkan nasibnya di atas dominasi tauke dalam menggeluti pekerjaannya sebagai buruh.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat bermanfaat sebagai :

1. Sumbangan pemikiran untuk mengungkapkan tantangan hidup nelayan sebagai pekerja (buruh) pada tauke (pengusaha kapal ikan) yang berpengaruh pada pendapatan nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup
2. Bahan pertimbangan dalam upaya-upaya penanggulangan dan pemberian bantuan yang tepat dan terarah terhadap nelayan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak

1.5. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi pergudangan Gabion Belawan kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB). Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa : Gabion Belawan merupakan suatu kawasan pergudangan sekaligus tempat usaha kapal penangkapan ikan, dimana para pengusaha (tauke) banyak mempekerjakan nelayan sebagai buruh (pekerja). Pergudangan Gabion, sebagai tempat usaha-bengkel sekaligus lokasi bongkar muat/lelang ikan hasil tangkapan nelayan buruh adalah merupakan pusat segala aktivitas nelayan buruh dalam melakukan berbagai jenis transaksi di wilayah perairan Belawan sebagai kota pelabuhan. Awal melakukan aktifitas hingga operasional usaha produksi berakhir di kawasan PPSB ini, sehingga semua data yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian dapat diperoleh secara akurat

Pada prakteknya lelang ikan hasil tangkapan nelayan tidak dilakukan secara terbuka, artinya penjualan harus kepada tauke dengan harga yang telah ditentukan di samping tauke telah memilih bagiannya sendiri dari pembagian hasil dengan jumlah yang telah disepakati. Lelang yang lebih dikenal dengan lelang tertutup pada prinsipnya adalah upaya memberi tekanan/pemaksaan pada nelayan karena tauke semakin leluasa dalam menjalankan dominasinya, sehingga Tempat Pelangan Ikan (TPI) umum dan terbuka yang dibangun oleh pemerintah praktis tidak dapat memenuhi fungsinya sebagai pusat lelang.

Pemerintah berharap dengan adanya TPI, para nelayan dapat melakukan lelang hasil tangkapannya secara bebas(terbuka) sesuai dengan mekanisme

pasar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan. “ rehabilitasi dan pembangunan prasarana perikanan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada nelayan berupa sarana pendaratan, perbengkelan dan tempat pelelangan...” (Juliantara, 2004: 71). Bagaimana ini bisa terjadi sehingga para nelayan tidak mengalami perbaikan dalam hasil pendapatannya (upah), hal ini yang perlu ditelusuri agar dapat memahami bagaimana dominasi itu tergambar dari sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan kerja bersama yang dibangun secara sepihak.

Dominasi yang dianggap sebagai kekuasaan yang dipaksakan, berlangsung dalam suatu bentuk kerjasama agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan kelebihan yang diambil dari kesepakatan kerja berupa aturan-aturan yang lebih berpihak kepada tauke serta kelebihan dari hasil tangkapan dalam sistem bagi hasil. Kelebihan-kelebihan yang dianggap timpang dalam hak dan kewajiban pada suatu bentuk hubungan kerjasama, tampaknya perlu ditinjau kembali demi perjuangan kelayakan hidup nelayan buruh.

Dipandang perlu ada perincian pembagian pendapatan hasil yang jelas, serta bagaimana sikap para nelayan pekerja menerima perlakuan tersebut, apakah ada upaya untuk melakukan usaha-usaha perbaikan/peningkatan pendapatan demi kelangsungan hidup atau bentuk perlawanan apa yang dilakukan menghadapi dominasi para tauke. Dengan mengamati/ menggeluti kehidupan para nelayan buruh melakukan aktifitas pekerjaannya di Gabion Belawan, diharapkan dapat menjawab semua permasalahan.

1.6. Metode Dan Teknik Pengumpulan Data

Mencermati objek kajian dalam penelitian ini adalah studi kasus dalam komunitas nelayan buruh (pekerja) di pegudangan Gabion Belawan, maka sifatnya adalah kualitatif. Untuk menjawab sejumlah permasalahan dalam penelitian ini, maka upaya pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi.

Observasi dilakukan dengan mengamati semua aktifitas nelayan yang diawali dengan bagaimana memulai perekrutan tenaga pekerja, persiapan apa yang dilakukan sebelum memulai operasional kapal dan bagaimana operasional produksi hingga perolehan/pendapatan.

Wawancara dilakukan sebelum, selama dilaut, dan kembali dari laut untuk memperoleh sejumlah data tentang bagaimana hubungan kerja sama yang akan dilakukan serta bagaimana kedua belah pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban, tantangan dan harapan para nelayan. Hasil wawancara ini dijadikan sebagai informasi (data) referensi untuk ditindaklanjuti. .

Untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara awal, maka dilakukan studi dokumenter dan lapangan. Dengan keterlibatan secara langsung mengikuti proses operasional kapal selama melaut hingga pada saat melakukan bongkar muat untuk mengukur keakuratan data. Aktivitas penimbangan pembagian hasil untuk mengetahui jenis ikan tangkapan, pengelompokan dan pembagian hingga pelaksanaan lelang agar diketahui berapa harga yang ditetapkan menurut jenis ikan dan gambaran penghasilan

(upah) yang diterima nelayan hanya dapat direkam secara utuh dengan keterlibatan secara langsung.

Bukti data fisik hasil pengamatan di lapangan, aktivitas produksi dalam operasional kapal mulai dari persiapan, selama melaut, kembali dari laut, bongkar muat hingga pelaksanaan lelang direkam dengan alat foto sebagai dokumentasi hasil penelitian.

1.7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari hasil wawancara terhadap informan serta hasil dari observasi awal dilakukan analisis data untuk dideskripsikan.

Deskripsi data hasil wawancara dicoba diuji dilapangan dengan mengamati, mencatat semua aktivitas kegiatan nelayan mulai dari persiapan, keberangkatan, aktivitas dilaut (operasional produksi ikan) sampai kembali hingga pada saat melakukan bongkar muat, pemilihan jenis ikan, penimbangan serta lelang hasil

tangkapan di gudang. Semua data hasil catatan dikelompokan sesuai dengan kategorisasi yang ditetapkan yaitu tentang tauke, tekong, nelayan pekerja, hubungan kerja bersama. serta aktivitas produksi

Data-data hasil pengamatan dianalisis kembali dan untuk lebih memperkaya dan mempertajam hasil analisis, maka kembali dilakukan wawancara. Kemudian semua hasil perolehan data dan analisis dideskripsikan, selanjutnya disusun dalam bentuk laporan hasil penelitian.

1.8. Kerangka Berpikir

Membangun hubungan kerja bersama pada dasarnya adalah adanya perjanjian yang saling mengikat antara kedua belah pihak dimana terdapat suatu kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing. Lazimnya pernyataan hak dan kewajiban diatur dalam bentuk kesepakatan secara tertulis berupa Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Kesepakatan Kerja Bersama sangatlah penting untuk memberikan jaminan kepastian akan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat

Isi dari kesepakatan harus jelas guna menghindari kemungkinan-kemungkinan timbulnya kesalah pahaman atau konflik. Konflik bisa saja terjadi akibat tidak jelasnya perjanjian yang mengikat diantara kedua belah pihak, sehingga satu sama lain dapat saling mencurigai dan bersikeras untuk mempertahankan kepentinganya masing-masing. Karena hubungan sosial selalu ditandai oleh adanya yang berkuasa dan dikuasai, maka peluang untuk saling mempertahankan posisinya sangat rentan terhadap benturan kepentingan, yang berujung pada aksi-aksi sebagai bentuk perlawanan terhadap penggunaan kekuasaan.

Bertitik tolak dari pandangan tersebut maka, hubungan kerjasama yang dibangun dengan dasar kekuasaan yang tidak seimbang akan memberikan dampak terhadap produktivitas dan kepuasan kerja, di mana terjadi ketimpangan yang sifatnya cenderung menguntungkan sebagian pihak (pengusaha). Dapat mengundang praduga negatif dalam komunitas nelayan sebagai pekerja yang

menyebabkan terjadinya disharmonisasi (perpecahan/kekacauan) dalam hubungan kerja sama yang dibina.

Kaburnya kewajiban dan hak dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang dibangun tanpa keterlibatan pekerja/buruh, memberi peluang/celah untuk mengadakan penekanan-penekanan terhadap para pekerja baik dalam hubungan sosial kerja maupun hubungan sosial ekonomi. Pengusaha sebagai pemilik kekuasaan bebas menentukan dan menerapkan peraturan-peraturan dalam menjalankan usahanya, tanpa perlu memikirkan nasib pekerjanya. Adanya posisi dominan dan posisi tertekan dalam hubungan kerjasama hendaknya dapat saling melengkapi sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing pihak.

Dapat dimaklumi timbulnya posisi dominan karena perbedaan tanggung jawab dalam pekerjaan, namun yang menjadi permasalahan adalah posisi dominan dengan kekuasaan yang tidak seimbang memberlakukan tekanan yang dianggap merugikan pekerja (nelayan). Perbedaan perlakuan yang didasarkan pada struktur pembagian kerja mengakibatkan lebih banyak pekerja yang mengalami ketidakpuasan (dirugikan). Beda perlakuan dianggap terlalu memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu (tekong). Sangat dilematis sekali karena para nelayan pekerja tidak dapat menuntut imbalan lebih dari jasa yang telah mereka berikan.

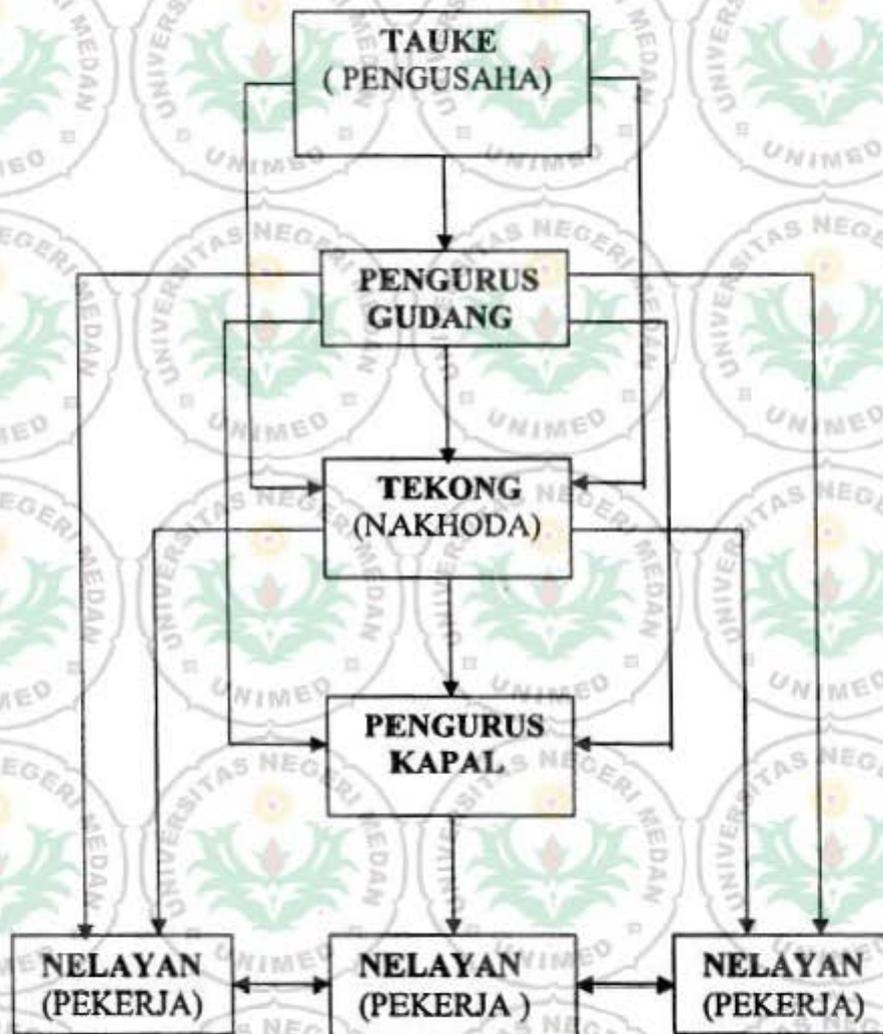
Menghadapi situasi yang demikian, serta adanya sikap pasrah menerima maka timbul pemikiran bahwa, dominasi tauke terhadap pekerjanya menciptakan hubungan kerja yang tidak harmonis bahkan cenderung eksploitatif. Tidak jelasnya isi dari KKB yang merupakan jaminan bagi pekerja

mengakibatkan para nelayan tidak memperoleh hak yang wajar dan dieksploitasi dalam pekerjaan dengan sistem bagi hasil yang diberlakukan berdasarkan peran dan fungsi. Sementara itu salah satu upaya untuk meningkatkan kelancaran dan kesinambungan usaha, produktivitas serta kepuasan kerja, adalah dengan pemberian upah yang layak bagi pekerja. Terjadinya kontradiksi pemikiran ini menuntut perlunya kajian secara lebih rinci agar dapat dicarikan upaya meminimalisir benturan kepentingan masing-masing pihak.

Pengusaha/tauke memandang pekerja tidak saja sebagai sarana produksi dalam ekspansi ekonomi yang tidak terbatas, tetapi disamping tenaga kerja yang dibayar sesuai dengan kesepakatan bersama perlu adanya pertimbangan memahami kondisi manusia sebagai objek kepedulian. Dengan demikian yang menjadi dasar pemikiran menanggapi bentuk hubungan kerja sama ini, tauke dengan modal, kepemilikan menempati posisi dominan sementara nelayan sebagai pekerja (pemberi jasa) tunduk pada hukum kepemilikan. Ketimpangan atas dasar perhitungan untung rugi menggiring nelayan terjebak dalam sikap ketergantungan saat mengalami masa-masa sulit. Ketergantungan inilah yang sebenarnya merupakan perangkap yang menyebabkan nelayan terjebak dan sulit menghindar.

Secara skematis alur pemikiran tergambar sesuai dengan tanda panah, tauke dalam posisi dominan dengan perantaraan orang kepercayaan (pengurus gudang) melakukan kerjasama dengan tekong memberi tekanan pada nelayan pekerja. Sesuai dengan pernyataan Galtung yang menempatkan centre (Tauke)

tidak secara langsung melakukan penekanan tetapi melalui perantara (pengurus gudang). Tekong ditempatkan pada posisi yang menguntungkan (sebagai mediator) dan mendapatkan perlakuan khusus oleh tauke. Tekong menduduki posisi yang secara langsung dapat berhubungan dengan nelayan maupun melalui perantara orang kepercayaannya (pengurus kapal) sementara nelayan berada pada posisi yang mendapat tekanan



Gambar Skema Dominasi Tauke-Nelayan dalam hubungan kerja

Gambaran posisi demikian berdasarkan perjanjian yang diambil menurut Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara tauke (pengurus gudang) dengan tekong yang sengaja tidak melibatkan nelayan sebagai pekerja/buruh. Dengan tidak dilibatkannya nelayan pekerja dalam menentukan isi kesepakatan dalam KKB membuka peluang bagi tauke untuk melakukan berbagai tekanan dalam upaya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan.

Atas dasar solidaritas sesama pekerja sebagai nelayan, walaupun dalam posisi yang tertekan antara tekong dan nelayan (pekerja) menghasilkan suatu kesepakatan menghadapi dominasi tauke untuk mempertahankan pekerjaannya. Kesepakatan dikalangan nelayan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk perlawanan menunggu tuntutan akan perubahan kondisi pekerjaan termasuk persoalan upah dalam sistem bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dari peranan penting nelayan sebagai komponen dalam sistem produksi yang merupakan spesialisasi khusus dan mampu melumpuhkan sektor usaha perikanan, karena aktivitas produksi sepenuhnya dikuasai oleh nelayan.

Melihat hubungan sosial berdasarkan hukum kepemilikan sebagai sumber membangun kekuasaan, maka adanya pihak yang menguasai dan yang dikuasai sangat riskan yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan orang-orang yang terlibat didalamnya. Benturan kepentingan-kepentingan tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk-bentuk perlawanan. Adanya keinginan untuk saling mendahulukan kepentingan masing-masing dapat memperuncing permasalahan sekaligus merupakan ancaman terhadap kelangsungan usaha. Apapun wujud dari bentuk perlawanan yang dilakukan pada intinya adalah

reaksi dari adanya ketidak puas/ketimpangan yang ditujukan sebagai tuntutan kearah perbaikan.

Tuntutan kearah perbaikan yang dilakukan oleh nelayan dapat berlangsung secara persuasive, tidak anarkis dan lebih mengutamakan kepentingan bersama dari pada keuntungan sepihak. Hal ini mereka lakukan karena adanya anggapan bahwa besar kemungkinan ada pihak-pihak yang dapat mereka rangkul untuk menengahi berbagai persoalan yang mereka hadapi. Secara bersama-sama memikirkan dan mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah merupakan solusi yang terbaik untuk dilakukan. Apapun hasil yang disepakati, masing-masing pihak dapat menerima sebagai satu keputusan bersama tanpa ada pemaksaan kehendak dan tekanan. Sebagai keputusan bersama tentunya pihak yang melakukan hubungan kerjasama mendapat jaminan kepastian dari semua konsekwensi yang ada, tidak perlu saling curiga dan dijadikan sebagai kekuatan yang sifatnya saling mengikat satu sama lain.